

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public*, merupakan pengkomunikasian perusahaan terhadap kegiatan CSR yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Pada era sebelum krisis, kebanyakan perusahaan Indonesia merupakan perusahaan konglomerasi yang erat kaitannya dengan Teori Neo-klasik. Menurut Prasetyatoko (2008: 14), Teori Neo-Klasik memandang perusahaan sebagai entitas yang tak terjelaskan, dikenal sebagai “kotak hitam”. Lebih lanjut teori ini menekankan fungsi utama perusahaan sebagai entitas produktif, yang menghasilkan output produksi serta menawarkan barang di pasar, sehingga membentuk fungsi penawaran kepada masyarakat.

Krisis pada tahun 1998 belum terlalu signifikan merubah sistem perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh sebagian masyarakat (konglomerasi), tetapi pada era ini munculnya kepentingan-kepentingan lain yang dianggap penting bagi perusahaan selain pemilik modal mulai terlihat. Kepentingan tersebut timbul akibat adanya keinginan perusahaan untuk mengembangkan potensi bisnisnya. Pada mulanya, perusahaan berawal dari perusahaan kecil, dikelola sendiri, dan hanya perusahaan keluarga (Berle dan Means dalam Prasetyantoko, 2008: 97). Namun, dalam perjalanan waktu, perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pengembangan usaha.

Kebutuhan dana yang cenderung sangat besar dapat dihimpun dengan menggunakan dua cara: pertama dapat meminjam melalui hutang, dan yang kedua dapat dihimpun melalui penerbitan saham perusahaan. Pilihan kedua menyebabkan timbulnya kepentingan investor didalam sebuah perusahaan. Adanya pemisahan kedudukan antara

pemilik modal (*principal*) dan pelaksana tanggung jawab perusahaan (*agent*) menyebabkan meningkatnya asimetri informasi dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan (*agency theory*) (Jensen dan Meckling, 1976). Perilaku struktur kepemilikan menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya terjadi pada agent dan principal tetapi dapat juga terjadi pada kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Konsentrasi kepemilikan dikhawatirkan akan mengisolasi kepentingan pihak eksternal.

Penelitian mengenai struktur kepemilikan telah dilakukan oleh Rustiarini (2010) menggunakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dalam penelitiannya tidak menemukan pengaruh terhadap pengungkapan CSR serta kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Novita dan Djakman (2008) meneliti kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak menemukan pengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan Hapsoro (2007) menggunakan kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan intitusi asing, dan kepemilikan publik dalam penelitiannya tidak menemukan pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Disamping itu Novita dan Djakman (2008) juga memasukan perusahaan BUMN dan Non-BUMN dalam penelitiannya sebagai variabel kontrol. Struktur kepemilikan pemerintah menjadi menarik untuk diteliti karena diberikannya penghargaan kepada 14 perusahaan BUMN dari 30 perusahaan publik yang terpilih memiliki *good corporate governance* terbaik menurut *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dikutip dari *Tempo.co* pada tanggal 26 Maret 2013. Disamping itu, adanya kerja sama yang dilakukan perusahaan-perusahaan *go public* memasukkan persentase kepemilikan pemerintah daerah sebagai tindakan kongkrit dalam membantu pembangunan daerah tertinggal dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Penulis juga menilai adanya kepentingan-kepentingan lain sejajar dengan status kepentingan investor, yaitu kepentingan *debtholder*. Kepentingan tersebut timbul akibat kewajiban hutang perusahaan dalam menghimpun sumber pendanaan perusahaan selain saham. *Debtholder* mensyaratkan laporan memiliki laba yang tinggi agar likuiditas perusahaan dalam membayar kewajibannya terpenuhi. Laba yang tinggi akan diperoleh dengan menurunkan biaya-biaya operasional perusahaan. Salah satu biaya yang dapat diturunkan adalah pengungkapan CSR. Menurut Sembiring (2005) dan Rosmasita (2007) *leverage* tidak signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Arah negatif menunjukkan semakin rendah *leverage* perusahaan maka pengungkapan informasi sosial yang dilakukan menjadi lebih luas dan sebaliknya. Tentu saja manajemen laba yang dilakukan manajer untuk kepentingan kreditur berlaku oportunistik terhadap kepentingan investor dalam perusahaan.

Kepentingan yang beraneka ragam merupakan permulaan timbulnya sistem pertanggung jawaban dan sistem pengawasan perusahaan dalam menciptakan *good corporate governance (GCG)*. Perilaku GCG merupakan hal yang baru dalam proses transformasi perusahaan Prasetyantoko (2008: 90), penekanan sangat menonjol dalam hal pendekatan terhadap *stakeholders* sebagai bagian lain dari ruang lingkup mengenai *agency theory*. Pendekatan *stakeholders* mencoba menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam menjalankan sebuah perusahaan sehingga terjadi kesinambungan kinerja untuk menciptakan tujuan utama perusahaan jangka panjang.

Pendekatan *stakeholders* mewajibkan perusahaan untuk memiliki peran dalam membangun pihak-pihak diluar perusahaan. Peran tersebut akan terlihat pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) sebagai bentuk media komunikasi perusahaan kepada masyarakat dan investor sebagai bentuk kegiatan

keberlanjutan perusahaan. Dalam melakukan pengungkapan terhadap CSR, perusahaan kemungkinan harus mengeluarkan biaya-biaya terkait pengungkapan tersebut. Namun, biaya CSR memiliki beberapa kendala dalam menetapkan dan mengakui jumlah biaya CSR. Tingkat pengungkapan dapat dijadikan sebuah acuan umum dalam menjelaskan seberapa besar kepedulian perusahaan dalam berperan aktif terhadap CSR. Disamping itu, tingkat pengungkapan CSR dianggap investor sebagai implementasi mekanisme *good corporate governance*.

Secara lebih rinci adanya gap riset tersebut disajikan dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Gap Riset dan Permasalahan

Permasalahan	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
Pengaruh struktur kepemilikan terhadap konflik keagenan	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan struktur kepemilikan dengan konflik keagenan	<i>Agency Theory</i> (Jensen & Meckling, 1976) <i>Neoclassical Theory</i> (Porter, 1992) <i>Agency Theory</i> (Berle & Means, 1932)	Struktur kepemilikan terkonsentrasi mengurangi biaya keagenan. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan. Struktur kepemilikan menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas
Pengaruh <i>leverage</i> terhadap pengungkapan	Terdapat perbedaan pandangan mengenai <i>leverage</i> terhadap pengungkapan	<i>Agency Theory</i> (Jensen & Meckling, 1976) <i>Positive Accounting Theory</i> (Watts & Zimmerman, 1990)	<i>Leverage</i> akan semakin mendorong manajemen melakukan pengungkapan. Kontrak hutang mendorong manajemen mengurangi biaya-biaya terkait perusahaan termasuk biaya pengungkapan

Sumber: Telaah jurnal untuk pengembangan studi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada gap riset dan fenomena yang disajikan di atas, masalah yang dihadapi adalah masih adanya berbagai perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan, *leverage* dengan tingkat pengungkapan CSR.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Menghadapi masalah seperti yang disajikan diatas, masalah yang diajukan adalah bagaimana mengembangkan sebuah model teoritikal untuk mengatasi perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan, *leverage* dengan tingkat pengungkapan CSR.

D. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Penulis akan membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR?
2. Apakah kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR?
3. Apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR?
4. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
5. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

H. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Investor
 - a. Sebagai salah satu masukan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan jangka panjang tercermin dalam hubungan perusahaan terhadap *stakeholder*.
 - b. Sebagai salah satu masukan perilaku investor di Indonesia dalam mewujudkan praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan.
 - c. Sebagai salah satu masukan terhadap tingkat ketaatan perusahaan dalam membangun komunikasi kepada *stakeholder*.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bermanfaat dan bukti empiris mengenai struktur kepemilikan serta perilakunya dalam ilmu akuntansi.
- b. Sebagai salah satu masukan kepada audit internal dalam mengorganisasikan penyebaran struktur kepemilikan agar dapat menciptakan *good corporate governance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian selanjutnya bisa memperbaiki kekurangan dan keterbatasan penelitian ini sehingga di masa depan dapat diperoleh hasil-hasil yang lebih akurat untuk menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR.